BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini secara tidak langsung telah mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dalam berbagai bidang termasuk dalam ranah hukum yang ikut mengalami perkembangan terutama di bidang TI (teknologi informasi).

Menurut Arnold M. Rose “*the law is a contributing factor to social changes*”¹ yang artinya “hukum merupakan faktor penyumbang perubahan sosial”. Yang dimana jika hal ini dikaitkan dengan masalah sekarang maka teknik persidangan juga harus dapat menyumbangkan perubahan sosial yang bersifat positif.

Contohnya saja seperti yang dijelaskan di dalam jurnal berbahasa asing yang berjudul “*Trial Proving in Electronic Criminal Case Trial Based On the Dignified Justice Perspective*” oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, Teguh Prasetyo, Erny Herlin Setyorini, dan Yovita Arie Mangesti yang menjelaskan bahwa “*Covid-19's ease of spread caused the government to enact a health safety protocol to reduce physical contact to prevent virus spread. In effect, a healthy safety protocol pushes the government to improve the halted justice process*”.²

---

¹ Nurjihad, “*Electronic Trial At The Supreme Court: Needs, Challenges And Arrangement*” Jurnal Jurisprudence Vol. 11, No. 2, 2020, hal. 174

² Novritsar Hasintongan Pakpahan, Teguh Prasetyo, Erny Herlin Setyorini, Yovita Arie Mangesti “*Trial Proving in Electronic Criminal Case Trial Based On the Dignified Justice Perspective*” IUS POENALE, Vol 3 Issue 1, January-June 2022, hal. 2

Yang artinya “Kemudahan penyebaran Covid-19 membuat pemerintah memberlakukan protokol keselamatan kesehatan untuk mengurangi kontak fisik guna mencegah penyebaran virus. Akibatnya, protokol keselamatan kesehatan ini mendorong pemerintah untuk memperbaiki proses peradilan yang terhenti”.

Dengan maraknya perubahan zaman ini, Mahkamah Agung memulai langkah awalnya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Semenjak PERMA ini dibentuk, Pembaharuan dalam sistem peradilan yang berkaitan erat dengan teknologi informasi seperti pelayanan publik berbasis teknologi informasi pun mulai di perhatikan. Dari PERMA ini lahirlah sebuah aplikasi *e-Court* (*Electronic Justice System*) yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Aplikasi *E-Court* ini merupakan suatu sistem manajemen administrasi untuk mencari keadilan yang dapat diakses secara elektronik.³

Namun pada tahun 2019 aplikasi *E-court* ini mengalami beberapa perubahan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya wabah Covid 19 yang memaksa pemerintah untuk melakukan terobosan baru untuk mengatasi maraknya kasus penundaan persidangan yang terjadi akibat larangan dari pemerintah. Oleh karena itu pihak Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menggantikan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Yang dimana aplikasi *e-court* ini

---

³ Syariful Alam, Nu'man Aunuh, Muhammad Luthfi “*E-Court Effectiveness of Religious Courts in Indonesia*”, Journal Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 590, 2021, hal. 92

kemudian dijadikan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya panjar secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara online, hingga pemanggilan dan persidangan secara online.⁴

Dengan adanya sistem *e-Court* ini sistem di Peradilan pun memiliki beberapa keunggulan baru di antaranya yaitu:

1. Adanya perubahan prosedur dalam penanganan suatu kasus yang berarti efisiensi waktu dalam penanganan kasus;
2. Perubahan cara berinteraksi dengan pejabat pengadilan, yang berarti bahwa pihak yang berperkara dapat dikurangi untuk datang langsung ke pengadilan; dan
3. Informasi elektronik pengadilan dapat memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.⁵

Berdasarkan data pada website *e-Court* milik Mahkamah Agung, layanan perkara secara elektronik ini telah tersedia di semua wilayah lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, pengadilan agama dan peradilan tata usaha negara.⁶ Begitu pun dengan Pengadilan Agama Banjarbaru. Semenjak tahun 2019 tepatnya tanggal 14 maret Pengadilan Agama Banjarbaru melakukan sosialisasi Aplikasi *E-court*

---

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku panduan *e-court*, 2019. hal. 7

⁵ Heni Rosida, Nadiyah Meyliana Putri, Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, Ahsana Nadiyya, Christ Sella, “*The Effectiveness of The Implementation of The e-Court Justice System and The Impact on Administrative Court in Indonesia*”, IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2 (1) 2022, hal. 269

⁶ Mahkamah Agung RI, “e-Court,” Mahkamah Agung, diakses 9 maret 2023, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama

guna mewujudkan kemudahan dalam pendaftaran persidangan hingga proses persidangan secara elektronik.

Jika dilihat melalui data yang di peroleh pada website *e-Court* milik Mahkamah Agung, layanan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Banjarbaru dari tahun 2019 hingga tahun 2022 telah mencapai 122 kali Persidangan secara Elektronik.⁷ Namun jika dilihat dari keseluruhan data persidangan, layanan *E-litigasi* ini hanya digunakan sebanyak 3,22% dari total perkara yang di tangani dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yang berjumlah 3.790 perkara yang diambil dari buku laporan pelaksanaan kegiatan PA Banjarbaru dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.⁸ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan persidangan normal lebih banyak digunakan dibandingkan dengan penggunaan persidangan secara elektronik, padahal tujuan dari persidangan elektronik ini adalah untuk memudahkan proses persidangan, mempercepat proses persidangan dan mempermudah biaya persidangan. Oleh karena itu masih banyak hal yang menjadi tanda tanya. seperti apa yang menjadi penyebab hal ini terjadi? apakah dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, atau faktor budaya yang menyebabkan sangat sedikitnya penggunaan persidangan elektronik ini digunakan.

Dengan PERMASalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di

---

⁷ Mahkamah Agung RI, “*e-Court*,” Mahkamah Agung, diakses 10 Agustus 2022, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama

⁸ PA Banjarbaru “*Laporan Tahunan*”, diakses 9 maret 2023, <https://pa-banjarbaru.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>

Pengadilan Agama Banjarbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru?
2. Apa saja kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana guna menambah pengetahuan serta wawasan tentang implementasi PERMA no 1 Tahun 2019 mengenai persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan dan bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca terkait implementasi PERMA no 1 tahun 2019 mengenai persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk semua pihak, terutama bagi masyarakat dan mahasiswa agar dapat lebih memahami tentang implementasi PERMA no 1 tahun 2019 serta dapat memahami lebih dalam mengenai mekanisme persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan dengan judul yang telah dicantumkan di atas, maka penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta PERMA masalah yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁹ Sedangkan di dalam buku yang berjudul *Implementation Research: a synthesis of the Literature* oleh Dean L. Fixsen, Sandra F. Naoon, Karen A. Blasé, Robert M. Fierdman,

---

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 580

dan Frances Wallace, menyebutkan bahwa “*Implementation is defined as a specified set of activities designed to put into practice an activity or program*”.¹⁰ Yang artinya “Implementasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mempraktekkan suatu kegiatan atau program”.

Adapun yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

2. PERMA

Secara pengertian PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) merupakan peraturan yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran keputusan ketua Mahkamah Agung RI nomor 57/KMA/SK/1V/2016.¹¹ Adapun mengenai PERMA yang dimuat dalam penelitian ini adalah meliputi peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

PERMA ini secara tegas mengatur dan mengarahkan pelaksanaan persidangan agar dapat dilakukan secara elektronik, sebagai bentuk

---

¹⁰ Dean L. Fixsen, Sandra F. Naon, Karen A. Blasé, Robert M. Fierdman, Frances Wallace, *Implementation Research: a synthesis of the Literature*, National Implementation Research Network, Florida, 2005, hal. 5

¹¹ JDIH Mahkamah Agung, diakses 10 maret 2023, <https://jdir.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-PERMA>

adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, memperluas akses terhadap keadilan, serta memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tanpa harus hadir langsung di ruang sidang. Dengan adanya pengaturan ini, pengadilan diharapkan mampu menyelenggarakan proses hukum yang lebih modern, transparan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

3. Persidangan Secara Elektronik

Secara pengertian persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹² Adapun mengenai persidangan elektronik yang di muat dalam penelitian ini adalah meliputi mekanisme persidangan elektronik yang telah diterapkan dalam beberapa persidangan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yang telah di laksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terutama mengenai literatur dan karya-karya ilmiah mengenai "Persidangan Elektronik" ini. Penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan di teliti. Oleh karena itu untuk menjamin keaslian dari penelitian ini, penulis akan memaparkan tulisan dengan tema yang serupa dengan penelitian ini, dengan

---

¹² Bab 1, Pasal 5, *Salinan peraturan Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, hal. 5

tujuan dapat mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dan fokus penelitian dari masing-masing penelitian. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan *Maslahah* (Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)” oleh Mira Ade Widyanti, pada tahun 2021. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan negeri Bangil yang dilakukan secara elektronik yang di tinjau menggunakan tinjauan *masalah*. Penelitian ini terfokus kepada bagaimana implementasi PERMA no 1 tahun 2019 terhadap sistem *E-Court*, mulai dari Pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan yang semuanya dilakukan melalui media elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi PERMA no 1 tahun 2019 di suatu pengadilan.¹³

Adapun perbedaan yang pertama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di bagian fokus penelitian yang dimana penulis hanya meneliti mengenai implementasi PERMA no 1 tahun 2019 yang terfokus pada bagian persidangan secara

---

¹³ Mira Ade Widyanti, *Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

elektronik saja, sedangkan penelitian ini terfokus kepada keseluruhan PERMA no 1 tahun 2019 tersebut. Yang kedua penelitian ini juga menggunakan tinjauan *masalah* sedangkan penulis tidak menggunakan tinjauan tersebut. Dan yang ketiga tempat dan jenis pengadilan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga berbeda yang dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bangil sedangkan penulis akan meneliti masalah ini di Pengadilan Agama Banjarbaru.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber. (Kabupaten Cirebon)” oleh Adam Kriyani NIM. 30501700012 jurusan Ahwal Syahsiyah pada tahun 2021. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi PERMA no 1 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumber yang terfokus terhadap penggunaan persidangan secara elektronik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di bagian PERMA yang digunakan dan juga di bagian fokus penelitian yang dimana penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama akan meneliti mengenai implementasi PERMA no 1 tahun 2019 serta sistematika penggunaan persidangan secara elektronik di pengadilan agama.¹⁴

---

¹⁴ Adam Kriyani, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber. (Kabupaten Cirebon)*. Skripsi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Adapun perbedaan pertama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada tempat penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Sumber sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan dilakukan pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Dan yang kedua adalah pada data penelitian yang diteliti yang dimana pada penelitian ini hanya terfokus kepada data tahun 2020 saja berbeda dengan yang akan dilakukan oleh penulis yang dimana penulis akan meneliti data-data terkait implementasi PERMA no 1 tahun 2019 ini sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan *E-Litigasi* Di Pengadilan Agama Banjarmasin” oleh Raudatun Ni'mah NIM. 1601110034 Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2021. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi PERMA nomor 1 tahun 2019 yang dikaitkan dengan proses pembuktian dalam tahapan persidangan secara elektronik atau *E-Litigasi*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai implementasi PERMA no 1 tahun 2019 di suatu pengadilan agama.¹⁵

---

¹⁵ Raudatun Ni'mah, *Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin*. Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021)

Adapun perbedaan yang pertama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada bagian fokus masalah yang diteliti yang dimana penelitian ini terfokus kepada tahapan pembuktian saja berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dimana penulis akan meneliti mengenai keseluruhan proses persidangan secara elektronik atau *E-Litigasi*. Perbedaan yang kedua yaitu pada tempat penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Banjarmasin sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

4. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar) oleh Choirul Hidayat NIM. 17102163092 jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020. Penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Blitar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti mengenai pelaksanaan PERMA no 1 tahun 2019 di suatu pengadilan agama.¹⁶

---

¹⁶ Choirul Hidayat, *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar)*. Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)

Adapun perbedaan yang pertama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di bagian fokus penelitian yang dimana penulis hanya meneliti mengenai implementasi PERMA no 1 tahun 2019 yang terfokus pada bagian persidangan secara elektronik saja, sedangkan penelitian ini terfokus kepada keseluruhan PERMA no 1 tahun 2019 tersebut. Dan yang kedua adalah pada bagian tempat penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Blitar sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

5. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” oleh Rizky Yunan Pratama NIM. 0201161040 jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah pada tahun 2021. Penelitian ini meneliti mengenai prosedur persidangan pasca *E-Litigasi*, serta faktor penyebab penerapan *E-Litigasi* yang dapat dikatakan belum efektif di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Tidak hanya demikian penelitian ini juga meneliti mengenai bagaimana proses berperkara melalui aplikasi *E-Litigasi* yang ditinjau dari *masalah mursalah*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di bagian objek penelitian yang dimana penelitian

ini sama-sama meneliti mengenai persidangan elektronik atau *E-litigasi*.¹⁷

Adapun perbedaan yang pertama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada bagian fokus masalah yang diteliti yang dimana penelitian ini terfokus kepada perkara perceraian saja tidak kepada perkara lainnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang meneliti keseluruhan perkara yang diselesaikan melalui *E-litigasi* atau persidangan elektronik dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Yang kedua adalah pada bagian perspektif yang digunakan yang dimana penelitian ini menggunakan perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah* sedangkan penulis tidak. Dan yang ketiga adalah pada bagian tempat penelitian yang dimana penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam sedangkan penulis akan melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Banjarbaru.

G. Sistematika penulisan

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang membahas tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA no 1 tahun 2019.

---

¹⁷ Rizky Yunan Pratama, *Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E- Litigasi) Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah*. Skripsi (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2021)

Bab III : Metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV : Berisi penyajian data dan analisis data.

Bab V : Bab terakhir yakni penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.